

TUNTUTAN MASYARAKAT TERHADAP KELUARNYA TURKI DARI KONVENSI ISTANBUL

Femri Resdifianti

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*
femriesd@gmail.com

Dini Septianti Nurkhasanah

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*
Dini_00@student.uns.ac.id

Ratih Kusuma Dewi

*Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia*
Ratihkusuma343@gmail.com

INFO ARTIKEL *Abstract*

Article History

Received

27 December 2021

Revised

14 February 2022

Accepted

17 February 2022

Keywords:

*Istanbul
Convention;
public sphere;
community
demands; Turkey.*

Kata Kunci:

*Konvensi
Istanbul; ruang
publik; tuntutan
masyarakat; Turki*

This study examines how the Turkish public form public opinion that demands Turkey's exit from the Istanbul Convention. The demands of the Turkish people in the public sphere are carried out while influencing the political practices of the current Turkish government. By using descriptive qualitative research methods and literature review techniques and studied with the theory of public space Habermas. The results of the study show that the Turkish public effectively uses the public sphere to express their disapproval and demand that the government leave the Istanbul convention. These demands have affected the domestic political situation, which led to the decision of the Turkish government to meet the demands of the people to leave the Istanbul Convention.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana publik Turki membentuk opini publik yang menuntut keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Tuntutan masyarakat Turki di ruang publik dilakukan sembari memengaruhi praktik politik pemerintah Turki yang sedang berkuasa. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik literature review, serta dikaji dengan teori ruang publik Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publik Turki secara efektif menggunakan ruang publik untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dan menuntut pemerintah meninggalkan konvensi Istanbul. Tuntutan tersebut telah mempengaruhi situasi politik dalam negeri, yang berlanjut pada keputusan pemerintah Turki untuk memenuhi tuntutan masyarakat untuk keluar dari Konvensi Istanbul.

PENDAHULUAN

Anti-gender movement merupakan gerakan kampanye yang bertujuan untuk menentang upaya *gender mainstreaming* yang terjadi di negara-negara Eropa seperti Perancis, Spanyol, Italia, Polandia, dan Turki (Kuhar & Paternotte, 2017). Gerakan anti-gender di Turki mendapat dukungan dari berbagai tokoh politik seperti presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Dalam berbagai kesempatan, Erdoğan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gerakan feminis dan konsep kesetaraan gender (Gulel & Choukroune, 2021). Pandangannya ini juga diterapkan Erdoğan di dalam kebijakannya yang salah satunya yaitu keputusannya untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Konvensi Istanbul merupakan perjanjian hak asasi manusia (HAM) untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2011 (Cerami, 2021). Konvensi ini dirancang oleh Dewan Eropa untuk menegakkan hak asasi manusia dan menetapkan standar yang mengikat secara hukum, tidak hanya untuk menghukum pelaku saja, akan

tetapi juga mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan korban. Kekerasan terhadap perempuan di Eropa memang marak terjadi, yang satu dari lima perempuan di Uni Eropa pernah mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik dan seksual. Menurut Platform We Will Stop Femicide Turki, setidaknya terdapat 300 perempuan yang dibunuh pada tahun 2020, yang sebagian besar dilakukan oleh pasangan mereka, dan terdapat 171 perempuan lainnya ditemukan tewas dalam keadaan yang mencurigakan di negara Turki (We Will Stop Femicide Platform, 2020). Ironisnya, Turki yang merupakan negara pertama yang menandatangani Konvensi Istanbul memutuskan untuk keluar dari Konvensi ini.

Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul tentunya memicu protes luas dari kelompok-kelompok perempuan dan keributan di media sosial yang mengkritik bahwa keputusan tersebut menandakan kemunduran besar bagi hak-hak perempuan di negara Turki yang masih memiliki tingkat kekerasan dan *femicide* berbasis gender yang tinggi (Yalcinalp, 2021). Adanya keputusan penarikan diri tersebut memunculkan

pertanyaan mengenai alasan apa yang melatarbelakangi keputusan Turki tersebut. Alasan penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul dijelaskan oleh Direktorat Komunikasi Turki bahwa Konvensi Istanbul telah dibajak oleh sekelompok orang yang mencoba menormalkan homoseksualitas dan hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan keluarga Turki (Directorat of Communication Turkey, 2021). Walaupun pihak pemerintah Turki telah mengeluarkan pernyataan tersebut, ada banyak pakar politik yang memandang bahwa alasan Turki keluar dari Konvensi Istanbul dipandang sebagai strategi politik Erdogan untuk tetap berkuasa, termasuk untuk mendapatkan dukungan dari fundamentalis agama yang dapat mendukung Erdogan dalam pemilihan Presiden Turki di masa yang akan datang (Aksoy, 2021).

Adanya alasan politik Erdogan yang memutuskan Turki keluar dari Konvensi Istanbul tersebut, tentunya tidak terlepas dari tuntutan masyarakat Turki yang menolak Konvensi Istanbul dan menuntut supaya Turki menarik diri dari konvensi tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya diskusi yang berkembang terkait penolakan

Konvensi Istanbul oleh masyarakat Turki di dalam ruang publik. Termasuk di dalam media sosial yang mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 2019, seperti melalui media sosial Twitter dengan tajuk *#FamilyCollaps* dan *#IstanbulContractNO* (The Independent Turkey, 2019a).

Argumen utama yang berkembang dalam masyarakat Turki yang menolak Konvensi Istanbul adalah bahwa pasal mengenai kesetaraan gender dianggap sebagai bentuk legalisasi terhadap homoseksual yang merusak nilai-nilai dan struktur keluarga yang ada di Turki (Elmas et al., 2021). Ruang publik (*public sphere*) ini tidak hanya dijadikan tempat untuk diskusi sesama masyarakat Turki mengenai perdebatan Konvensi Istanbul saja, akan tetapi ruang publik ini juga digunakan sebagai mediasi antara masyarakat Turki dan pemerintah Turki untuk mempertimbangkan keluar dari Konvensi Istanbul (Zakirah, 2020). Pada tahun 2020, perwakilan dari partai AKP yaitu Numan Kurtulmus menyatakan bahwa adanya permintaan dari publik membuat mereka akan mempertimbangkan untuk keluar dari

Konvensi Istanbul (Elmas et al., 2021). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa terdapat keterlibatan masyarakat Turki di ruang publik yang memberikan pengaruh terhadap keputusan penarikan diri Turki dari Konvensi tersebut. Atas dasar tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana pengaruh tuntutan masyarakat Turki terhadap keputusan Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul.

KERANGKA KONSEPTUAL

Teori Ruang Publik Habermas

Menurut Jurgen Habermas dalam bukunya yang berjudul "*The structural transformation of the public sphere: an inquiry into a category of bourgeois society*" menjelaskan mengenai ruang publik sebagai ruang masyarakat privat yang berkumpul membentuk suatu publik untuk mendiskusikan masalah publik (Habermas, 1989). Dalam bukunya, Habermas menjelaskan dua pokok tema, yaitu asal mula ruang publik dan perubahan sosial struktural ruang publik, dimana Habermas kemudian menggambarkan ruang publik borjuis sebagai ruang masyarakat privat yang berkumpul bersama menjadi publik

untuk memenuhi tuntutan publik. Ruang publik juga dapat berfungsi sebagai mediasi bagi masyarakat dalam membahas masalah sosial maupun publik, sehingga opini yang menjadi konsensus dapat berpotensi mendatangkan suatu perubahan (Kadarsih, 2008).

Lebih lanjut, Habermas menjelaskan bahwa pada ranah publik terjadi pengumpulan masyarakat privat yang membentuk sebuah publik, dan nalar publik bekerja untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara (Sari & Siahainenia, 2015). Di dalam ruang publik ini, masyarakat dapat mengungkapkan ekspresinya secara langsung terhadap kepentingan mereka sembari mempengaruhi praktik politik. Konsep utama dalam teori ruang publik Habermas ini mengutamakan pada konsepsi dialogis, ruang tempat masyarakat berkumpul di tempat yang sama dan terjadi percakapan secara tatap muka langsung. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat konsep ruang publik Habermas bergeser dan memberikan ruang digital untuk masyarakat privat sehingga dapat memudahkan proses

diskusi dan mengakses informasi dengan mudah (Nasrullah, 2012).

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif dipilih dikarenakan metode ini dapat mencakup berbagai macam isu dan permasalahan sosial melalui analisis dan pemahaman terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi, dan penulis berupaya menjelaskan objek yang diteliti secara deskriptif. Penelitian ini secara spesifik melihat dan menganalisis pengaruh tuntutan masyarakat Turki terhadap keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Atas dasar tersebut penulis mengategorisasikan penelitian ini ke dalam penelitian jenis deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui kajian kepustakaan. Sumber penulisan diperoleh dari analisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti: jurnal, buku, penelitian, laporan, survei, portal berita, serta sumber-sumber lain yang relevan. Proses pengumpulan data diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan

analisis dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kata-kata kunci yang digunakan dalam proses penelusuran data, seperti *anti-gender movement turkey*, konvensi istanbul turki, pro-kontra konvensi istanbul, penarikan diri turki dari konvensi istanbul, serta KADEM. Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, penulis akan mereduksi data yaitu mengkategorisasikan data-data dalam beberapa kategori, menyusun ke dalam pola, memilih informasi-informasi yang penting, mengerucutkan data, serta membuat kesimpulan.

PEMBAHASAN

Anti-Gender Movement di Turki

Kelompok sosial anti-gender adalah gerakan kampanye yang pertama muncul di Eropa untuk menghadapi apa yang disebut reaksi gender atau penentangan yang diarahkan pada isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan reproduksi dan aborsi, kekerasan terhadap perempuan, lesbian, *gay*, biseksual, transgender, interseks, dan *queer* (LGBTIQ), pernikahan *gay*, pengarusutamaan gender, pendidikan seks di sekolah, serta kebijakan anti diskriminasi

(Kuhar & Paternotte, 2017). Gereja Katolik dan Vatikan memainkan peran penting dalam melakukan pengaturan agenda tentang ideologi anti-gender di Eropa. Kampanye ini dimulai sebagai proyek Katolik sebagai reaksi atas hasil konferensi PBB di Kairo dan Beijing pada pertengahan 1990-an, tentang Kependudukan dan Pembangunan 1994 di Kairo dan Konferensi Perempuan Dunia di Beijing pada 1995 (Zacharenko, 2020). Saat itu, istilah "gender" mulai muncul dalam dokumen resmi konferensi ini, menggantikan istilah yang lebih esensial "jenis kelamin", untuk menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukanlah hasil dari perbedaan biologis, melainkan dari perbedaan yang dibangun secara sosial antara gender. Namun, selama konferensi ini, The Holy See menyatakan keberatan secara eksplisit tentang istilah "gender" dan bersikeras untuk menggunakan istilah "jenis kelamin" di dalam dokumen terakhir dari kedua konferensi tersebut.

Mirip dengan perkembangan kesetaraan gender di Eropa, di Turki, wacana anti-gender berkembang hingga mendapatkan momentum pada pemerintahan baru Turki dibawah kepemimpinan AKP yang mengadopsi

wacana populis yang melibatkan unsur-unsur Islamis nasionalisme dan konservatisme (Kourou, 2020). Politik gender AKP menunjukkan kebijakan dan wacana politik partai mengikuti narasi pro-Islam yang menerapkan konsep gender tradisional. Badan Pendanaan Sains Nasional Turki melarang penerbitan artikel tentang teori evolusi Darwin dan semua terbitan buku tentang teori evolusi termasuk buku teks sekolah, bahkan Kementerian Pendidikan Turki membatalkan program gender di sekolah (Williams, 2017). Erdogan juga yang memilih dari Akademi Sains Turki yang membuat akademi sains merefleksikan politik Turki.

Selain itu, Presiden Erdoğan juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap gerakan feminis dan konsep kesetaraan gender. Pada pertemuan dengan organisasi wanita, Erdoğan menyatakan bahwa wanita tidak setara dengan pria dan bahwa tidak ada kesetaraan di antara mereka (Gulel & Choukroune, 2021). Menurut Erdoğan wanita hanya bisa sama dengan wanita. Erdoğan juga menyatakan bahwa perbedaan biologis berarti perempuan dan laki-laki tidak memiliki fungsi untuk melakukan pekerjaan yang

berbeda. Dia juga memberikan pidato serupa di KTT Istanbul yang menyatakan: 'Agama kami (Islam) telah menentukan posisi bagi wanita: sebagai sosok ibu' (Agence France-Presse in, 2014). Erdogan kemudian mengkritik bagaimana feminis menolak gagasan peran keibuan. Penolakan Erdogan terhadap wacana feminis kemudian didukung oleh Yilmaz, seorang akademisi di JWS yang berpendapat bahwa feminis adalah milik Barat dan tidak dapat diterima oleh Budaya Turki (Eslen-Ziya, 2020). Wacana anti-gender Turki ini berbicara mengenai bagaimana perempuan dan laki-laki tidak bisa setara karena bertentangan dengan alam, jenis kelamin kemudian menjadi alat retorik yang digunakan oleh pemerintah AKP untuk melawan kesetaraan gender dan untuk memajukan tujuan politik (Corredor, 2019).

Berbeda dengan gerakan anti-gender di negara lain di Eropa, gerakan anti-gender Turki lebih berfokus pada perubahan diskursus gender. Turki berupaya untuk membuat diskursus gender tandingan yang dikenal dengan *gender justice* (Eslen-Ziya, 2020). Dalam rangka mewujudkan agenda

tersebut Pemerintah membentuk Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) atau Women and Democracy Association. KADEM adalah Asosiasi Perempuan dan Demokrasi yang dibuat oleh putri Presiden Erdogan Sumeyye Erdogan Bayraktar pada tahun 2013 yang bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai penting perempuan di Turki dalam hal ini menjaga yang disebut esensi budaya, keluarga dan peran sosial (The Independent Turkey, 2019a). KADEM secara aktif mendukung kebijakan untuk melindungi keluarga sebagai pilar negara. KADEM juga berperan penting dalam menciptakan wacana untuk pengaturan agenda publik tentang isu-isu terkait kesetaraan gender dan hak perempuan di Turki. Wacana anti-gender di Turki diciptakan melalui apa yang tampak sebagai wacana ilmiah religius rasional. Dengan kata lain, narasi anti-gender dan populis pemerintahan AKP didukung oleh akademisi. KADEM melalui jurnal akademiknya yaitu JWS memainkan peran utama dalam mendukung dan mengembangkan diskursus *gender justice* (Eslen-Ziya, 2020). Selain itu, berbicara mengenai gerakan anti-gender di Turki, juga tidak terlepas dari anti-gender politik

Turki yang terlihat dari keputusan pemerintah Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Sebenarnya tidak ada agenda tersembunyi dalam Konvensi Istanbul, yang tujuan utamanya sudah jelas yaitu untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, serta kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kampanye informasi yang salah tentang istilah gender dan tuduhan palsu oleh pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu bahwa Konvensi mengancam gagasan keluarga tradisional Turki mengakibatkan beberapa negara gagal meratifikasi Konvensi ataupun menarik diri seperti yang dilakukan oleh Turki pada 20 Maret 2021 (Genç, 2021).

Konvensi Istanbul

Konvensi Dewan Eropa tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dikenal sebagai Konvensi Istanbul, merupakan perjanjian hak asasi manusia untuk melawan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga yang mulai berlaku pada tahun 1 Agustus 2011 (Cerami, 2021). Konvensi ini

melahirkan kebijakan *zero-tolerance* untuk kekerasan keluarga yang dirancang oleh Dewan Eropa untuk menegakkan HAM, dan menetapkan standar yang mengikat secara hukum, tidak hanya untuk menghukum pelaku saja, akan tetapi juga mengenai pencegahan kekerasan dan perlindungan korban. Walaupun Konvensi Istanbul mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena yang netral gender karena pelaku kekerasan dalam rumah tangga bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, akan tetapi konvensi ini mengakui bahwa secara tidak proporsional kekerasan dalam rumah tangga lebih memengaruhi perempuan (Gunes, 2021). Oleh karena itu, Konvensi Istanbul menjadi dokumen pertama yang mengikat secara hukum yang membentuk hubungan struktural antara kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Konvensi Istanbul memberikan serangkaian kewajiban komprehensif bagi negara-negara penandatangan untuk menangani segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam kerangka hukum HAM internasional, termasuk kewajiban pemerintah negara untuk berinvestasi

dalam pendidikan, pengumpulan data terkait kejahatan berbasis gender, serta penawaran layanan dukungan untuk para korban. Pada Juli 2019, terdapat 47 negara yang menandatangani Konvensi Istanbul, dan sebanyak 34 negara telah meratifikasinya (Malhotra, 2021). Turki menjadi negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Istanbul dan menyerahkan instrumen ratifikasinya kepada Sekretariat Dewan Eropa pada 14 Maret 2012 (Gullu, 2019). Setelah Turki meratifikasi Konvensi Istanbul tersebut, Undang-Undang Perlindungan Keluarga Turki (No. 4320) dicabut dan diganti dengan pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Keluarga dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (UU No. 6284). UU No.6284 ini memiliki beberapa keunggulan, seperti undang-undang tersebut memiliki tujuan untuk melindungi keluarga dan mencegah kekerasan perempuan, penggunaan definisi kekerasan perempuan yang dipromosikan dalam Konvensi Istanbul, dan penyediaan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk membantu korban (Gunes, 2021).

Konvensi Istanbul tentunya menjadi perjanjian terobosan yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana negara harus bekerja menuju kawasan yang bebas dari kekerasan berbasis gender, terlebih karena pandemi Covid-19 yang membuat *lockdown* dan mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah telah memperburuk keterpaparan wanita dan anak perempuan terhadap pasangan dan anggota keluarga yang kasar. Namun, Konvensi Istanbul yang dianggap sebagai terobosan penyelamat ini masih mendapat ketidaksetujuan dari beberapa pihak, dan ironisnya Turki yang merupakan negara pertama yang menandatangani konvensi ini telah memutuskan untuk keluar meninggalkannya. Hal ini tentunya memberi banyak konsekuensi bagi jutaan perempuan dan anak perempuan di Turki.

Keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengeluarkan dekret pada tanggal 20 Maret 2021 yang menjelaskan bahwa Turki menarik diri dari Konvensi Istanbul. Dekret tersebut dipublikasikan dalam Berita Resmi

pada tanggal 20 Maret 2021, Keputusan Presiden 3718 berbunyi:

“It is decided that the Council of Europe Treaty on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence signed on 11/5/2011 and ratified on 10/2/2012 with the Council of Ministers Decision No 2012/2816 is to be terminated based on Presidential Decree No 9 paragraph 3” (The Advocates Human Rights, 2021).

Penarikan diri tersebut tentunya memicu protes luas dari kelompok-kelompok perempuan dan keributan di media sosial yang mengkritik bahwa keputusan tersebut menandakan kemunduran besar bagi hak-hak perempuan di negara Turki yang masih memiliki tingkat kekerasan dan *femicide* berbasis gender yang tinggi. Adanya keputusan penarikan diri tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan apa yang melatarbelakangi keputusan Turki ini. Pada 22 Maret 2021, Direktorat Komunikasi Turki lebih lanjut menerbitkan pernyataan mengenai alasan penarikan dari Konvensi Istanbul, alasan yang diberikan adalah sebagai berikut:

‘The Istanbul Convention, originally intended to promote

women’s rights, was hijacked by a group of people attempting to normalize homosexuality – which is incompatible with Türkiye’s social and family values. Hence the decision to withdraw.

Türkiye is not the only country who has serious concerns about the Istanbul Convention. Six members of the European Union (Bulgaria, Hungary, Czechia, Latvia, Lithuania and Slovakia) did not ratify the Istanbul Convention. Poland has taken steps to withdraw from the Convention, citing an attempt by the LGBT community to impose their ideas about gender on the entire society.” (Direktorat of Communication Turkey, 2021).

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Direktorat Komunikasi Turki tersebut menjelaskan bahwa alasan Turki yang merupakan negara pertama yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Istanbul mengumumkan pengunduran dirinya dengan alasan bahwa Konvensi Istanbul digunakan untuk menormalkan homoseksualitas, yang hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keluarga Turki.

Selama beberapa tahun terakhir, Konvensi Istanbul telah diserang oleh kelompok, anti-feminis dan anti-LGBTI+, agama yang kecil namun kuat secara politik. Dalam upaya lobi

intens mereka, kelompok ini menuduh bahwa Konvensi Istanbul telah merusak struktur keluarga tradisional dan mengadvokasi hak-hak LGBT (Bengisu, 2021). Pada bulan Agustus 2020, para pejabat di Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mengisyaratkan bahwa Turki sedang mempertimbangkan untuk menarik diri dari Konvensi Istanbul setelah kelompok konservatif agama tersebut memulai upaya lobi yang intens terkait penarikan diri dari Konvensi Istanbul (Aksoy, 2021). Konvensi Istanbul ini juga menimbulkan perbedaan pendapat antara AKP dan beberapa LSM hak-hak perempuan konservatif, termasuk KADEM.

Beberapa pakar menganggap bahwa keputusan penarikan Turki dari Konvensi Istanbul oleh Presiden Erdogan sebagai strategi politik yang diperhitungkan untuk mendapatkan dukungan dari fundamentalis agama, sekaligus untuk meningkatkan popularitas Erdogan yang sempat tenggelam (The Advocates Human Rights, 2021). Strategi politik tersebut tentunya dianggap akan mendukung Erdogan dalam mencari masa jabatan keempat dalam pemilihan Presiden berikutnya yang saat ini dijadwalkan

pada tahun 2023 (Gall, 2021). Penarikan diri dari Konvensi Istanbul memberikan Erdogan beberapa keuntungan politik yang akan membantunya dalam mempertahankan kekuasaannya (Aksoy, 2021). Pertama, penarikan diri dari Konvensi Istanbul menjadi isyarat simbolis bagi Erdogan dan AKP yang menargetkan untuk menghidupkan kembali basis pemilih konservatif mereka yang tidak puas dengan penurunan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Kedua, adanya potensi kekalahan dalam pemilu membuat Erdogan mencari sekutu baru dengan mengajukan tawaran kepada Islamist Felicity Party (SP) pada Januari 2021. Islamist Felicity Party dipilih Erdogan karena memiliki akar Islam yang sama dengan AKP dan populer di kalangan pemilih ultrakonservatif, yang antusias mendukung penarikan Turki dari Konvensi Istanbul, dan penarikan tersebut digunakan Erdogan sebagai alat tawar-menawar untuk kemungkinan aliansi pemilihan di masa depan. Ketiga, penarikan Turki dari Konvensi Istanbul dapat memberikan Erdogan keuntungan untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin.

Keputusan keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul telah memberikan reaksi baik dari dalam maupun luar Turki. Setelah keputusan Erdogan untuk menarik Turki dari Konvensi Istanbul menarik reaksi ribuan perempuan turun ke jalan-jalan di kota-kota Turki untuk memprotes keputusan tersebut dengan meneriakkan slogan-slogan seperti "*Istanbul Convention saves lives*", "*Murders of women are political.*" dan "*We don't accept one man's decision*" (Yalcinalp, 2021). Direktur Amnesty International Turki Ece Unver mengatakan bahwa penarikan diri dari Konvensi Istanbul merupakan bencana bagi jutaan perempuan dan anak-anak yang tinggal di negara Turki (DW, 2021). Sebuah koalisi kelompok perempuan juga menggambarkan pengunduran diri tersebut sebagai sebuah mimpi buruk, dan mereka menyatakan bahwa penarikan dari Konvensi Istanbul akan memberdayakan para pembunuh, penyiksa, dan pemerkosa wanita. Selain itu, Aktivis hak-hak perempuan, pengacara konstitusional, asosiasi pengacara di Turki, dan politisi oposisi bersikeras bahwa Erdogan tidak dapat secara hukum membawa Turki keluar dari konvensi internasional yang

diratifikasi oleh parlemen (The Advocates Human Rights, 2021). Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar konstitusi bahwa eksekutif tidak dapat merebut kekuasaan legislatif.

Selain dari reaksi domestik, keputusan Erdogan tersebut juga direspon oleh aktor internasional yang meminta Turki untuk mempertimbangkan kembali keputusan penarikan diri dari Konvensi Istanbul (Strasbourg, 2021). Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Burić menyebut bahwa penarikan Turki tersebut sebagai berita yang menghancurkan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Borell juga mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan Turki yang keluar dari Konvensi Istanbul dan mendesak Turki untuk membatalkan keputusannya melalui cuitan di akunnya di media sosial twitter. Sedangkan Presiden Amerika Serikat Biden juga ikut memberikan respon terhadap keputusan Turki, dengan menyatakan bahwa penarikan Turki yang tiba-tiba dan tidak beralasan dan mengecewakan (The Advocates Human Rights, 2021).

Pengaruh Tuntutan Masyarakat Terhadap Keputusan Penarikan Diri Turki dari Konvensi Istanbul

Menurut Habermas, ruang publik dijelaskan sebagai ruang masyarakat privat yang berkumpul membentuk suatu publik untuk mendiskusikan masalah publik (Habermas, 1989). Penarikan diri Turki dari Konvensi Istanbul tentunya tidak terlepas dari tuntutan masyarakat Turki dalam ruang publik yang menolak Konvensi Istanbul. Hal ini terlihat dari banyaknya diskusi permintaan masyarakat Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul mulai ramai diperbincangkan pada tahun 2019. Terdapat dua argumen utama mengenai kritik terhadap konvensi istanbul, yaitu: pertama, tuduhan terhadap pasal ke-3 dan ke-4 mengenai kesetaraan gender sebagai bentuk legalisasi terhadap homoseksual; dan kedua, tuduhan merusak struktur keluarga terhadap ketentuan yang mengusir laki-laki dari rumah atas dasar pernyataan wanita. Selain kedua argumen utama tersebut, beberapa pihak juga mengkritik pasal 48 yang melarang adanya mediasi terhadap kasus kekerasan (Satil, 2021).

Ruang publik, baik yang berkembang di media sosial, tidak hanya telah dijadikan sebagai tempat untuk diskusi sesama masyarakat Turki mengenai perdebatan Konvensi Istanbul saja, akan tetapi ruang publik ini juga digunakan sebagai mediasi antara masyarakat Turki dan pemerintah Turki untuk mempertimbangkan keluar dari Konvensi Istanbul (Zakirah, 2020). Sebelum peringatan hari perempuan dunia pada Maret 2019, The Turkish Family Assembly membuat ajakan di media sosial yang menyerukan masyarakat untuk melakukan sholat jumat di beberapa masjid di 8 kota besar pada *women's day*. Motto mereka adalah "*stop the global war on the family*" yang merupakan slogan yang sama yang diserukan oleh kelompok anti-gender di Eropa. Mereka menuntut pembatalan konvensi istanbul dan pencabutan UU No. 6284 yang bertujuan untuk mencegah kekerasan pada perempuan. Seruan ini juga menyerukan slogan "*gender equality and homosexuality terrorism are crimes against humanity*". Selain itu mereka juga memiliki tuntutan-tuntutan lain mengenai topik-topik yang diperdebatkan seperti hak asuh

anak dan pembayaran perceraian (Ozkazanc, 2019).

Diskusi semakin ramai ketika penulis media Yeni Safak yaitu Yusuf Kaplan melalui akun pribadinya di Twitter mengkritik (The Independent Turkey, 2019a) program KADEM dengan Kementerian Pendidikan dan Keluarga mengenai penerapan kesetaraan gender di sekolah (Eslenzia, 2020). Menurutnya program tersebut menghancurkan esensi keluarga dan harus dihentikan. Pernyataan Yusuf Kaplan ini menjadi pembahasan yang cukup ramai di media sosial Turki dengan tajuk *#FamilyCollaps* dan juga *#IstanbulContractsNO* (The Independent Turkey, 2019a). Pernyataan tersebut ditanggapi oleh salah satu pendiri KADEM, Özlem Zengin, yang menyatakan bahwa program yang sedang mereka jalankan merupakan program yang mementingkan perempuan dan keluarga. Pembicaraan menjadi lebih ramai setelah berbagai pihak ikut bergabung di dalam diskusi tersebut. Professor Yildirim yang merupakan penulis di Yeni Safak mendukung pernyataan Yusuf dengan menyatakan bahwa KADEM mendukung

kesetaraan gender dan bahwa kesetaraan gender tidak ada di dalam konsep islam yang maka dari itu dapat menghancurkan esensi keluarga (The Independent Turkey, 2019a). Media Yeni Safak ini memang selalu konsisten menuliskan penolakannya terhadap konvensi Istanbul (Elmas et al., 2021). Selain itu, Ketua *the Anatolian Youth Association (AGD)*, Salih Turhan, juga ikut serta dalam diskusi dengan menyatakan di dalam akun twitter pribadinya bahwa Konvensi Istanbul tidak sesuai dengan iman, nilai moral, dan harus dihentikan sebelum menghancurkan keluarga (The Independent Turkey, 2019b).

Pada Mei 2020, Türkiye Düşünce Platformu atau Turkey Thought Platform mengirimkan laporan evaluasi Konvensi Istanbul kepada presiden dan menyatakan bahwa di dalam upayanya mencegah kekerasan terhadap perempuan, konvensi ini membahayakan sosial dan budaya Turki (Karasu, 2020). Konsep kesetaraan gender di dalam Konvensi Istanbul mencoba membentuk masyarakat yg *genderless*. Selain itu, adanya konsep kekerasan di dalam pasangan juga nantinya akan mengubah pengertian keluarga dan

pernikahan. Lebih lanjut mereka juga menyoroti pengaplikasiannya di dalam pendidikan yang ditakutkan nantinya konsep ini akan diajarkan sejak kecil dan akan mengubah struktur sosial masyarakat. Mereka juga menyoroti bahwa konvensi istanbul tidak hanya melegalkan LGBT dengan memasukkan mereka ke dalam subjek kekerasan, akan tetapi juga merupakan pengakuan preferensi mereka di bawah hukum internasional melalui konsep *domestic violence* (Karasu, 2020).

Diskusi terus berlanjut dengan semakin banyaknya pihak yang menyuarakan penolakan terhadap Konvensi Istanbul, serta muncul banyak permintaan untuk mengundurkan diri dari konvensi istanbul. Seven Crescent Association mengkritik definisi gender di dalam konvensi istanbul yang mendefinisikan gender sebagai sebuah konstruksi sosial bukan perbedaan fisik dan biologis laki-laki dan perempuan, dan mereka melihat definisi ini nantinya akan mengancam sistem dan nilai-nilai dalam keluarga (The Independent Turkey, 2019b). Jurnalis Fatma Gülşen Koçak membacakan tuntutan atas nama Turkish Family Council yang intinya meminta penghentian konvensi

istanbul. Mereka menyerukan moto "*Family first*" "*protect family first*" "*2020 the year of the family*" (Karasu, 2020). Ketua Yayasan Persatuan Agama Turki Diyanet-Sen, Mehmet Bayraktutar, dalam program Word Square yang ditayangkan di Akit TV juga menyatakan bahwa Konvensi Istanbul merupakan proyek transformasi sosial, dan melegitimasi amoralitas, serta negara-negara yg menurutnya modern menolak Konvensi Istanbul. Oleh karena itu, Konvensi Istanbul harus dibatalkan dan meminta para politisi untuk bertindak (The Independent Turkey, 2019a). Selain itu, Cabang Persatuan Penulis Turki Istanbul juga ikut bersuara dengan mengadakan konferensi pers untuk menuntut penghapusan Konvensi Istanbul.

Diskusi yang terjadi di dalam ruang publik mengenai penolakan Konvensi Istanbul ini tidak hanya dilakukan oleh organisasi dan kelompok saja, namun juga masyarakat individu Turki ikut menyuarakan tuntutan mereka terhadap pemerintah Turki untuk keluar dari Konvensi Istanbul. Abdurrahman Dilipak, seorang penulis Turki meminta pengunduran diri Turki dari konvensi

istanbul karena baginya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan persetujuan Allah, dia juga berpendapat bahwa Konvensi Istanbul merupakan bentuk penipuan yang mengatasnamakan HAM (CEBECI, 2020). Pengacara Mehmet Şefik Kocaağ meminta pengunduran diri Turki dari konvensi istanbul karena bertentangan dengan tradisi dan struktur islam dan telah menyebabkan kerusakan bagi struktur keluarga dan masyarakat (Temur, 2020). Baginya hukum tersebut menambah masalah baru karena banyak masalah keluarga yang muncul dan terjadi banyak perceraian akibat hukum ini. Kocaağ juga berpendapat bahwa membawa masalah keluarga ke ranah hukum tidak sesuai dalam kaidah Al-Quran. Menurut Al-Quran, masalah keluarga dapat diselesaikan dalam proses musyawarah. Selanjutnya apabila gagal maka pihak ketiga seperti psikolog keluarga dapat ikut andil membantu menyelesaikan masalah keluarga bukannya langsung memanggil polisi. Maka dari itu, hukum tersebut menjadi sumber dari permasalahan. Selain itu, Kocaağ juga menyayangkan Konvensi Istanbul yang menjadi simbol bagi komunitas LGBT, dia juga menyoroti beberapa negara-

negara lain di Eropa yg tidak menandatangani Konvensi Istanbul (Temur, 2020).

Walaupun banyak diskusi yang membahas penolakan masyarakat terhadap Konvensi Istanbul, ternyata masih banyak sebagian masyarakat Turki yang masih mendukung Konvensi tersebut. Bahkan di antara mereka juga mengkritik argumen dari pihak-pihak yang menolak bergabungnya Turki dalam Konvensi Istanbul. Beberapa pihak yang mengkritik argumen yang menentang adanya Konvensi Istanbul adalah Fidan Ataselim, Sekretaris Jenderal We Will Stop Femicide Platform yang mengemukakan pandangannya bahwa Konvensi Istanbul bertujuan untuk memberantas kekerasan berbasis gender (The Independent Turkey, 2019b). Ataselim juga meminta masyarakat yang menilai Konvensi Istanbul sebagai perusak struktur keluarga untuk melihat kembali konteks yang terkandung di dalam Konvensi Istanbul. Ataselim juga mempertanyakan tradisi dan keluarga mana yang dimaksud dalam kritik masyarakat tersebut. Ataselim lebih mengkritik adanya kekerasan terhadap perempuan yang terus menerus terjadi

karena Konvensi Istanbul tidak dapat berjalan secara efektif. Selain Fidan, jurnalis Sibel Eraslan juga menyatakan dukungannya bahwa Konvensi Istanbul merupakan “*living law*” yang berarti bahwa hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat (The Independent Turkey, 2019b). Lebih lanjut Sibel Eraslan menjelaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah hukum yang dapat melindungi nilai-nilai keluarga.

Pada Agustus 2020, KADEM juga menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap kritik masyarakat yang menyatakan bahwa Konvensi Istanbul melegitimasi homoseksual. Canan Güllü, President of the Federation of Women's Associations of Turkey, juga menyatakan pentingnya Konvensi Istanbul di dalam mencegah kekerasan di dalam dunia konservatif (The Independent Turkey, 2019a). Dia juga menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat karena dominasi laki-laki didukung oleh kekuasaan politik. *Lawyer* Canan Arın, pendiri the Mor Roof Women's Shelter Foundation, menyatakan juga menyatakan pandangannya bahwa Konvensi Istanbul merupakan konvensi yang paling komprehensif

dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Arın juga mengkritik argumen yang menyatakan bahwa Konvensi Istanbul merusak struktur keluarga dengan menyatakan bahwa perempuan seringkali mengalami kekerasan di dalam keluarga (DW, 2020). Selain itu, beberapa pihak juga mendukung KADEM seperti Selin Nakıpoğlu yang merupakan pengacara dari Mor Roof Women's Shelter Foundation menyatakan bahwa meskipun dia seringkali berbeda pandangan dengan KADEM akan tetapi kritik yang dilayangkan masyarakat terhadap KADEM tidak adil. Nakıpoğlu juga menunjukkan kekecewaannya kepada kritik masyarakat mengenai Konvensi Istanbul, serta menjelaskan bahwa konvensi ini merupakan konvensi yang penting bagi perjuangan wanita dan bahwa yang menolak konvensi ini adalah laki-laki. Nakıpoğlu membantah kritik yang mengatakan bahwa konvensi ini dapat merusak struktur keluarga. Baginya, argumen ini hanya merupakan alasan dari kekerasan yang dilakukan laki-laki (The Independent Turkey, 2019b).

Pada tahun 2020, perwakilan dari partai AKP yaitu Numan Kurtulmus

menyatakan bahwa adanya permintaan dari publik membuat mereka akan mempertimbangkan untuk keluar dari Konvensi Istanbul (Elmas et al., 2021). Namun, survei yang dilakukan oleh KONDA terhadap 3.569 orang di 32 provinsi mengenai apakah mereka harus meninggalkan Konvensi Istanbul menyatakan bahwa 36% masyarakat mengatakan bahwa mereka harus tetap ada di konvensi istanbul. 7% mengatakan harus keluar dan 58% masyarakat tidak tahu mengenai isu yang sedang diperbincangkan (Satil, 2021). Hal ini tentunya menjadi perdebatan di dalam ruang publik Turki, dimana pihak yang mendukung Konvensi Istanbul mengemukakan pernyataan Numan Kurtumulus dan memulai kampanye “Konvensi Istanbul Menyelamatkan Nyawa”. Sedangkan para pihak politik yang pro-AKP berpendapat bahwa konvensi tersebut dipaksakan oleh Barat untuk menormalkan homoseksualitas yang mana tidak sesuai dengan nilai-nilai keluarga yang ada di Turki.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Elmas dkk (2021) menjelaskan mengenai kampanye disinformasi terkait hak-hak perempuan yang mendorong penarikan

Turki dari Konvensi Istanbul. Mereka menemukan bahwa kampanye yang dilakukan oleh dan untuk pria yang bercerai di dalam grup Facebook menjadi ruang publik untuk menarik audiensi yang lebih luas dan menggalang dukungan dari berbagai kelompok, termasuk kelompok agama konservatif. Caranya dengan membingkai ulang argumen mereka mengenai homoseksualitas dan Konvensi Istanbul. Elmas dkk menemukan bahwa grup dengan anggota terbanyak berkaitan dengan politik, sehingga memungkinkan grup tersebut untuk menjangkau masyarakat Turki yang lebih luas dan beragam dalam kampanye anti-konvensi Istanbul. Di luar jaringan, beberapa kelompok merupakan asosiasi yang didirikan untuk melobi konvensi Istanbul. Mereka yang terlibat dalam kelompok ini dilaporkan melakukan protes jalanan sehingga terlihat bahwa mereka secara aktif melobi dan memiliki pengaruh lebih besar.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dilihat bahwa ruang publik dimanfaatkan masyarakat Turki untuk mendiskusikan mengenai pro dan kontra Konvensi Istanbul sesuai dengan teori ruang publik Habermas.

Di sini masyarakat Turki membentuk opini public, yaitu menuntut keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Masyarakat Turki kemudian menyampaikan tuntutananya secara langsung dengan aktif, seperti memperluas kampanye penolakan Konvensi Istanbul untuk menarik audiens yang banyak, dan menyuarakan argumen dan alasan mengapa Konvensi Istanbul harus ditolak melalui media massa maupun media sosial. Tuntutan masyarakat Turki di ruang publik juga dilakukan sembari memengaruhi praktik politik pemerintah Turki yang sedang berkuasa. Upaya lobi yang dilakukan masyarakat Turki yang intens terkait Konvensi Istanbul yang merusak nilai-nilai tradisional keluarga Turki membuahkan hasil setelah pejabat dari AKP mengisyaratkan akan mempertimbangkan Turki untuk menarik diri dari Istanbul pada tahun 2020. Opini publik yang terbentuk dalam diskusi masyarakat Turki di ruang publik tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu mempengaruhi dan menggerakkan negara untuk melindungi nilai-nilai keluarga di Turki dan mengatasi ancaman yang dapat merusak nilai-nilai tersebut

dengan mendorong pemerintah Turki untuk memutuskan keluar dari Konvensi Istanbul tersebut pada 20 Maret 2021.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa wacana anti-gender di Turki berkembang hingga mendapatkan momentum pada pemerintahan baru Turki dibawah kepemimpinan AKP yang mengadopsi wacana populis yang melibatkan unsur-unsur Islamis nasionalisme dan konservatisme.

Sesuai dengan teori ruang publik Habermas bahwa ruang publik digunakan masyarakat untuk mendiskusikan suatu hal untuk kepentingan bersama, yang dalam kasus ini yaitu masyarakat Turki membentuk opini publik yaitu menuntut keluarnya Turki dari Konvensi Istanbul. Tuntutan masyarakat Turki di ruang publik dilakukan sembari memengaruhi praktik politik pemerintah Turki yang sedang berkuasa. Upaya lobi yang dilakukan masyarakat Turki yang intens terkait Konvensi Istanbul yang merusak nilai-nilai tradisional keluarga Turki mulai memengaruhi keputusan

pemerintah Turki yang mempertimbangkan Turki untuk menarik diri dari Istanbul. Tuntutan masyarakat Turki di ruang publik tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu memengaruhi dan menggerakkan negara untuk melindungi nilai-nilai keluarga di Turki dan mengatasi ancaman yang dapat merusak nilai-nilai tersebut dengan mendorong pemerintah Turki untuk memutuskan keluar dari Konvensi Istanbul.

REFERENSI

- Agence France-Presse in. (2014, November 24). *Recep Tayyip Erdoğan: 'Women not equal to men.'* The Guardian. <http://www.theguardian.com/world/2014/nov/24/turkeys-president-recep-tayyip-erdogan-women-not-equal-men>
- Aksoy, H. A. (2021). *What lies behind Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention?* Stiftung Wissenschaft Und Politik (SWP). <https://www.swp-berlin.org/en/publication/what-lies-behind-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention>
- Bengisu, I. (2021, May 5). Turkey's withdrawal from the Istanbul Convention: A step in the wrong direction. *LSE Women, Peace and Security Blog*. <https://blogs.lse.ac.uk/wps/2021/05/05/turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention-a-step-in-the-wrong-direction/>
- CEBECI, B. (2020). *İstanbul Sözleşmesi: Kim neden savunuyor, kim neden karşı?* <https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbul-sozlesmesi-kim-neden-savunuyor-kim-neden-karsi-5949818/>
- Cerami, C. (2021). Turkey, Europe and Women's Rights: The Controversial Debate on the Istanbul Convention. *Nuovi Autoritarismi e Democrazie: Diritto, Istituzioni*, V. 3 N. 1 (2021): <https://doi.org/10.13130/2612-6672/15644>
- Corredor, E. S. (2019). Unpacking "Gender Ideology" and the Global Right's Antigender Countermovement. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 44(3), 613–638. <https://doi.org/10.1086/701171>
- Directorat of Communication Turkey. (2021). *Statement regarding Türkiye's withdrawal from the Istanbul Convention*. <http://wt.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/statement-regarding-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention/>
- DW. (2020). *İstanbul Sözleşmesi neden hedef oluyor?* DW.COM. <https://www.dw.com/tr/istanbul->

- s%C3%B6zle%C5%9Fmesini-neden-hedef-oluyor/a-53415793
- DW. (2021). *Turkey: Thousands protest exit from domestic violence treaty*. DW.COM. <https://www.dw.com/en/turkey-thousands-protest-exit-from-domestic-violence-treaty/a-57027554>
- Elmas, T., Overdorf, R., & Aberer, K. (2021). Tactical Reframing of Online Disinformation Campaigns Against The Istanbul Convention. *ArXiv:2105.13398 [Cs]*. <http://arxiv.org/abs/2105.13398>
- Eslen-Ziya, H. (2020). Right-wing populism in New Turkey: Leading to all new grounds for troll science in gender theory. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 1–9. <https://doi.org/10.4102/hts.v76i3.6005>
- Gall, C. (2021, March 20). Erdogan Pulls Turkey From European Treaty on Domestic Violence. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2021/03/20/world/europe/turkey-erdogan-women-violence.html>
- Genç, K. (2021). Turkey withdraws from treaty on violence against women. *The Lancet*, 397(10283), 1433–1434. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00837-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00837-0)
- Gulel, D., & Choukroune, L. (2021). *Turkey: Erdoğan's decision to pull out of Istanbul Convention has put him in opposition to women*. The Conversation. <http://theconversation.com/turkey-erdogans-decision-to-pull-out-of-istanbul-convention-has-put-him-in-opposition-to-women-157753>
- Gullu, C. (2019). SYRIAN REFUGEE WOMEN AND AND GIRLS IN TURKEY AND THE ISTANBUL CONVENTION. *Turkish Policy Quarterly*, 18(1), 79–87.
- Gunes, A. (2021). Legal Implications of Turkey's Accessions to the Istanbul Convention by Enacting and Refining Its Laws on Violence Against Women. *Women & Criminal Justice*, 31(3), 210–224. <https://doi.org/10.1080/08974454.2019.1697792>
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Kadarsih, R. (2008). DEMOKRASI DALAM RUANG PUBLIK: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, 9(1), 1–12.
- Karasu, A. O. (2020). *İstanbul Sözleşmesi'ne kim neden karşı çıkıyor*. *Www.Haberturk.Com*. <https://www.haberturk.com/yazalar/ayse-ozek-karasu/2754167->

- istanbul-sozlesmesine-kim-neden-karsi-cikiyor
- Kourou, N. S. (2020). RIGHT-WING POPULISM AND ANTI-GENDER MOVEMENTS: THE SAME COIN WITH DIFFERENT FACES. *Global Political Trends Center*, 68, 1–10.
- Kuhar, R., & Paternotte, D. (2017). *Anti-Gender Campaigns in Europe Mobilizing against Equality*. Rowman & Littlefield International Ltd.
- Malhotra, A. (2021). *Istanbul Convention and International Law*. Jindal Global Law School India.
<https://www.ssrn.com/abstract=3816343>
- Ozkazanc, A. (2019, May 20). The new episode of anti-gender politics in Turkey. *Engenderings*.
<https://blogs.lse.ac.uk/gender/2019/05/20/new-episode-anti-gender-turkey/>
- Sari, D. K., & Siahainenia, R. R. (2015). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual pada Kasus Satinah. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 12(1), 105–119.
<https://doi.org/10.24002/jik.v12i1.1446>
- Satıl, C. (2021). *Istanbul Sözleşmesi Neden Tartışılıyor?*
<https://www.dogrulukpayi.com/bulten/istanbul-sozlesmesi-neden-tartisiliyor>
- Strasbourg. (2021). *Council of Europe leaders react to Turkey's announced withdrawal from the Istanbul Convention*.
<https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/council-of-europe-leaders-react-to-turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention>
- Temur, C. (2020). *Hukukçu Kocağa: "İstanbul Sözleşmesi aile ve toplum ahlakına ciddi zararlar veriyor"* [Text]. İLKHA; İLKHA.
<https://ilkha.com/guncel/hukukcu-kocaaga-istanbul-sozlesmesi-aile-ve-toplum-ahlakina-ciddi-zararlar-veriyor-131284>
- The Advocates Human Rights. (2021). *TURKEY WITHDRAWAL FROM ISTANBUL CONVENTION: A STEP BACKWARD FOR WOMEN'S HUMAN RIGHTS* (pp. 1–49). The Advocates Human Rights.
- The Independent Turkey. (2019a, July 9). *Sosyal medyadaki KADEM tartışması büyüyor: Aile yapısına ters mi, değil mi?* Independent Türkçe.
<https://www.indyturk.com/node/49646/haber/sosyal-mediyadaki-kadem-tart%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1-b%C3%BCy%C3%BCyor-aile-yap%C4%B1s%C4%B1na-ters-mi-de%C4%9Fil-mi>

- The Independent Turkey. (2019b, July 10). *İstanbul Sözleşmesi: Kim neden destekliyor, kim neden karşı çıkıyor?* Independent Türkçe.
<https://www.indyturk.com/node/50036/haber/istanbul-s%C3%B6zle%C5%9Fmesi-kim-neden-destekliyor-kim-neden-kar%C5%9F%C4%B1-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1y-or>
- We Will Stop Femicide Platform. (2020). *WE WILL STOP FEMICIDE PLATFORM: WE ARE LEARNING, EXPLAINING AND EXTENDING THE STRUGGLE*.
<http://www.kadincinayetleriniurduracagiz.net/for-english>
- Williams, J. (2017). *Turkey bans teaching of evolution – but science is more than a belief system*. The Conversation.
<http://theconversation.com/turkey-bans-teaching-of-evolution-but-science-is-more-than-a-belief-system-80123>
- Yalcinalp, E. (2021). *Turkey Erdogan: Women rise up over withdrawal from Istanbul Convention*. BBC News.
<https://www.bbc.com/news/world-europe-56516462>
- Zacharenko, E. (2020). *Anti-gender mobilisations in Europe*. The Greens/EFA in the European Parliament.
- Zakirah, D. M. almas. (2020). Pengaruh Hoax di Media Sosial Terhadap Preferensi Sosial Politik Remaja di Surabaya. *Jurnal Mediakita*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30762/mediakita.v4i1.2446>